

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Claudia Tabitha Panjaitan¹

Joko Suharianto²

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20221).

Korespondensi Penulis: 12claudianovember@gmail.com, djoko@unimed.ac.id.

Abstract. This study was created to investigate the impact of the number of workers and the minimum wage at the provincial or district level on the open unemployment rate in North Sumatra. The method used is a quantitative approach, which focuses on building relationships per variable from 2001 to 2024. The method is multiple linear regression technique and OLS (ordinary least squares) estimation. The data used is secondary data from the Central Bureau of Statistics and other relevant agencies. The results show that an increase in the minimum wage has a significant effect on the increase in unemployment, especially if it is accompanied by a large enough surge in the number of workers but also followed by an increase in employment opportunities. This finding confirms that minimum wage policies must be carefully weighed against economic growth and labor market dynamics to avoid adverse impacts on society and the regional economy. This research provides an important contribution for policymakers to manage the labor market in North Sumatra more effectively and sustainably.

Keywords: Unemployment, Minimum Wage, Labor Force, Labor Market, North Sumatra.

Abstrak. Dibuatnya penelitian ini guna menyelidiki bagaimana dampak jumlah tenaga kerja dan upah minimal di tingkat provinsi atau kabupaten terhadap angka pengangguran

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

terbuka di Sumatera Utara. Metode yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif, yang fokus buat ngebangun hubungan per variabel dari tahun 2001 sampai 2024. Metodenya yaitu teknik regresi linier berganda dan estimasi OLS (*ordinary least squares*). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Hasilnya memperlihatkan bahwa kenaikan upah minimum punya pengaruh signifikan terhadap naiknya angka pengangguran, terutama jika diiringi dengan lonjakan jumlah tenaga kerja yang cukup besar tapi diikuti juga dengan kenaikan peluang kerja. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan soal upah minimum harus dipertimbangkan secara matang dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja agar nggak malah menimbulkan dampak buruk buat masyarakat dan ekonomi daerah. Penelitian ini memberi kontribusi penting buat para pembuat kebijakan agar bisa mengelola pasar tenaga kerja di Sumatera Utara dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengangguran, Upah Minimum, Angkatan Kerja, Pasar Tenaga Kerja, Sumatera Utara.

LATAR BELAKANG

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan regional, masalah pengangguran tetap menjadi salah satu isu utama yang harus diatasi dan menjadi perhatian serius. Pengangguran memengaruhi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah serta kesejahteraan individu dan keluarga. Jumlah angkatan kerja yang terus berkembang setiap tahun akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka pendidikan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika jumlah angkatan kerja terlalu besar sementara lapangan pekerjaan terbatas, maka tentu akan terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam konteks ekonomi makro, tingkat pengangguran ini menjadi indikator penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai indikator utama dari kesehatan pasar tenaga kerja di sebuah wilayah, pengertian ini mencerminkan jumlah individu dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja tetapi aktif mengejar pekerjaan dan bersedia bekerja (BPS, 2024; World Bank, 2020). Menurut

(Dewi, 2018) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan situasi di mana ada perbedaan antara kesempatan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja.

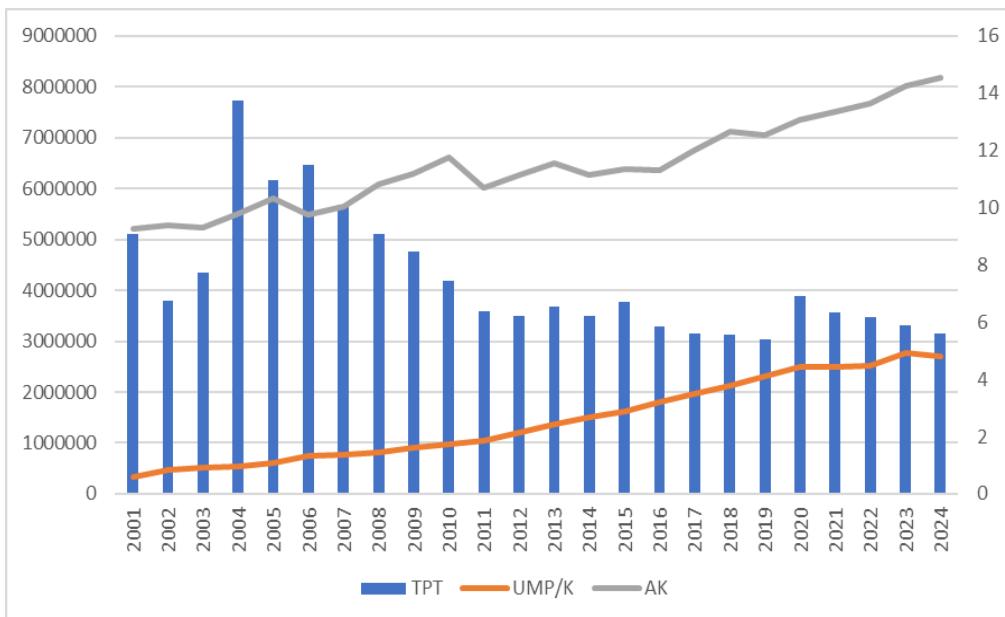
Tren kenaikan pengangguran tidak hanya karena faktor ekonomi makro, tetapi juga dipicu oleh faktor internal seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dan perubahan struktural di industri, seperti masuknya teknologi otomatisasi dan digitalisasi. Pada BPS 2022, tingkat pengangguran di provinsi Sumatera utara berada di angka sekitar 5-7%, dengan tren fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian mereka.

(Sofiah et al., 2024) Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa kenaikan upah minimum ternyata berpengaruh terhadap pengurangan jumlah karyawan baru, karena beban biaya yang harus ditanggung menjadi lebih tinggi. Banyak pelaku usaha enggan ekspansi dan merekrut tenaga kerja baru karena ketidakpastian pasar dan biaya operasional yang tinggi, terutama terkait upah minimum yang cukup tinggi di daerah-daerah tertentu. Upah minimum adalah faktor pertama yang mempengaruhi tingkat angkatan kerja dan masalah pengangguran. Meskipun tren kenaikan upah dapat membuat pencari kerja lebih tertarik untuk mendapatkan jaminan upah dari perusahaan, Hal ini juga dapat bertentangan dengan praktik bisnis karena menaikkan upah minimum di atas harga pasar bisa membuat ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan permintaan. Angka pengangguran meningkat dan banyak pengusaha melakukan PHK sebagai akibatnya.

Faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu upah minimum dan angkatan kerja yang ini perlu dipahami untuk mengurangi tingkat pengangguran (Badria, 2021)). Dan juga jumlah angkatan kerja yang meningkat tanpa diiringi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan menyebabkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja dan berimplikasi pada meningkatnya tingkat pengangguran (Ilmiah & Pendidikan, 2024). Hal ini karena pasokan tenaga kerja lebih banyak dibanding peluang kerja yang tersedia, menciptakan persaingan ketat dan pengangguran meningkat. Jika upah minimum terlalu tinggi, hal itu dapat menyebabkan PHK dan kurangnya investasi, yang berujung pada meningkatnya pengangguran (Anggi Erlangga et al., 2024). Upah Minimum di Provinsi Sumatera Utara Terus meningkat. Hal ini tentu saja bisa mempengaruhi Tingkat Pengangguran.

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi dan Angkatan Kerja di Sumatra Utara Tahun 2001-2024



Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara (2001-2024)

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2001 hingga 2024, Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara (UMP) meningkat setiap tahun. Secara keseluruhan, UMP mengalami kenaikan yang konsisten, meningkat dari sekitar Rp300.000 pada tahun 2001 hingga lebih dari Rp2,9 juta pada tahun 2023. Namun, perkembangan ini tidak selalu sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meskipun secara teori kenaikan UMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, kenyataannya peningkatan tersebut tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran. Jika kenaikan UMP tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas dan ketersediaan lapangan kerja, justru dapat menciptakan hambatan baru, terutama bagi sektor informal dan UMKM.

Berdasarkan data BPS, tidak ditemukan hubungan linier yang kuat antara kenaikan UMP dan penurunan TPT di Sumatera Utara. TPT justru menunjukkan tren yang fluktuatif, mengindikasikan adanya gap empiris yang perlu dianalisis lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara upah minimum dan pengangguran terbuka, namun hasil yang ditemukan menunjukkan ketidakkonsistensi-

secara empiris. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh (Khusnul, 2018) menunjukkan bahwa peningkatan UMP di beberapa provinsi Indonesia mempunyai hubungan negatif ke pengangguran. Disisi lain, riset oleh (firmansyah, 2022) mencatat bahwa UMP yang terlalu tinggi justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja atau mendorong perusahaan untuk beralih ke otomatisasi. Tentu saja, penelitian gap ini akan menarik untuk mempelajari lebih lanjut hubungan antara tingkat pengangguran dan upah minimum provinsi di Provinsi Sumatera Utara.

Hingga pada 2024, jumlah angkatan kerja mendekati 8,5 juta jiwa, namun tingkat pengangguran tetap berada pada kisaran 5–7%. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja menjadi salah satu penyebab stagnannya TPT, ditambah dengan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal dan belum terstrukturnya sektor informal. Kondisi ini diperburuk oleh mismatch antara jenis pekerjaan dan kompetensi angkatan kerja.

Menurut (Abdianti & Novera, 2024) Angkatan kerja juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Semakin tinggi angkatan kerja, semakin positif dampaknya. Bilamana kenaikan kesempatan kerja disertai dengan peningkatan tingkat ketenagakerjaan maka peningkatan kesempatan kerja tidak sama dengan peningkatan tingkat ketenagakerjaan. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Alius et al., 2023), menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja muda dan pencari kerja, dimana sebagian besar dari mereka memilih untuk berwirausaha atau bekerja di sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan informasi dengan melakukan analisis deret waktu selama 24 tahun. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jumlah angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

KAJIAN TEORITIS

Pengangguran

Tingkat pengangguran mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi gagal mendapatkan pekerjaan. Data BPS menunjukkan pola TPT yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir misalnya, meningkat dari 5,28 % pada 2019 ke

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

7,07 % pada 2020 karena efek pandemi. Menurut (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Dibandingkan dengan PDB, variabel angkatan kerja dan upah minimum punya pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pengangguran nasional, menunjukkan bahwa variabel lokal, seperti upah dan ketersediaan tenaga kerja, lebih dominan daripada variabel makro, seperti produk domestik bruto.

Selain itu, (Fatoni & Prasetyanto, 2022) menemukan bahwa angkatan kerja memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi baik pada jangka pendek maupun panjang. Dapat diidendifikasikan bahwa pengangguran bisa menjadi penahan utama pembangunan ekonomi daerah.

Upah Minimum

Upah minimum (UMP atau UMK) berperan sebagai alat kebijakan kesejahteraan pekerja dan sekaligus alat pengendalian sosial-ekonomi. Namun, hasil lain dari penelitian beberapa penelitian (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022) menyatakan secara simultan upah minimum, pendidikan, dan angkatan kerja mempengaruhi pengangguran, dan secara parsial semua kecuali PDB berpengaruh signifikan.

Di sisi lain, penelitian terkini menunjukkan peningkatan upah minimum diikuti penurunan TPT, karena upah yang layak mendorong partisipasi pasar kerja. Ini sejalan dengan pendapat pakar yang menyebutkenaikan upah menunjang produktivitas dan kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan penelitian (Abidin et al., 2024) malah menunjukkan UMP provinsi tidak signifikan mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Jadi, perlu diuji lebih lanjut mekanisme lokal di Sumut.

Angkatan Kerja

Pengertian dari angkatan kerja yaitu komponen utama dalam analisis ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Menurut BPS (2024), Angkatan kerja adalah individu/orang yang berusia diatas 15 tahun tapi yang bekerja/aktif mencari pekerjaan. Individu yang bekerja merupakan yang pertama lalu individu yang

menganggur secara terbuka adalah yang kedua. Peran angkatan kerja tidak hanya sebagai indikator jumlah tenaga siap kerja, tetapi juga sebagai penentu kapasitas produktif suatu wilayah.

Faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah dan gender juga memengaruhi karakteristik angkatan kerja. Di banyak daerah, seperti Sumatera Utara, tingkat keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja masih rendah, hal ini berkontribusi pada kurang sempurnanya masyarakat memanfaatkan potensi ekonomi secara menyeluruh (Hasibuan, 2022). Secara nasional, angkatan kerja, pendidikan, serta upah minimal secara bersamaan berdampak signifikan pada tingkat pengangguran. Salah satu aspek penting adalah kualitas, kualitas AK yang sesuai kebutuhan pasar adalah kunci penyusutan TPT (Soleh, 2017).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian kuantitatif ini untuk mengenal seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. studi ini memakai pendekatan asosiatif, yang dipilih karena pendekatan ini memungkinkan analisis statistik inferensial yang dilakukan pada data numerik untuk menunjukkan secara objektif bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun rentang waktu data yang dianalisis adalah tahun 2001 hingga 2024.

Analisis regresi linier berganda, diterapkan agar menganalisis data penelitian. Dan digunakan metode estimasi Ordinary Least Squar. Sejauh mana variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y secara parsial dan simultan dihitung dengan menggunakan model ini.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
X1	= Upah Minimum Provinsi (UMP)
X2	= Angkatan Kerja (AK)
β_0 dan β_1 , β_2	= Konstanta dan Koefisien regresi
ϵ	= Error term

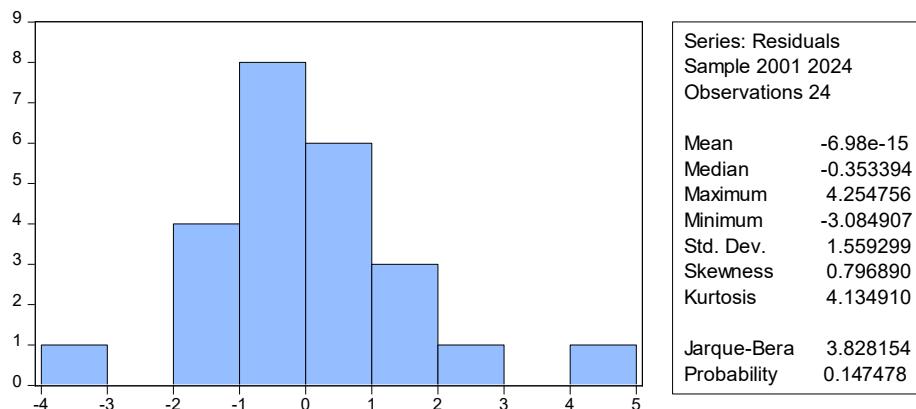
PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Untuk memastikan validitas model regresi, dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik yang meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dilakukan sesuai dengan prosedur dalam (Ghozali, 2011), guna memastikan bahwa hasil estimasi model bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Serta dilakukan uji hipotesis yang melalui Uji t (parsial), Uji F (simultan), Koefisien Determinasi (R^2) dan Model Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Pada uji normalitas peneliti mengkonfirmasi bahwa data residual dari teknik regresi terdistribusi secara normal. Hal ini penting untuk memenuhi salah satu asumsi klasik dalam regresi linier, yakni agar estimasi yang dihasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), error term (residual) harus menyebar normal. Nilai Jarque-Bera sekitar 3.828 dan nilai probabilitas sekitar 0.1474 ditemukan pada Gambar Histogram. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, bisa dirangkum bahwa residual di model ini berdistribusi gaussian/normal.

Meskipun masih di bawah batas wajar untuk regresi, nilai skewness sekitar 0.796 menunjukkan bahwa distribusi residual agak condong ke arah kanan. Nilai Kurtosis sebesar 4.13, sedikit lebih tinggi dari nilai normal (3), yang mengindikasikan distribusi agak leptokurtik, tetapi tetap dapat diterima dalam konteks data time series. Secara visual, histogram residual juga menunjukkan pola yang menyerupai kurva normal, dengan mayoritas nilai residual berada di sekitar

rata-rata dan simetris ke kiri dan kanan. Jadi bisa ditarik kesimpulan teknik regresi memenuhi asumsi normalitas residual, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis dan interpretasi hasil.

b. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.838266	Prob. F(2,19)	0.0835
Obs*R-squared	5.520904	Prob. Chi-Square(2)	0.0633

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah residual dalam teknik regresi menunjukkan adanya hubungan dengan yang lain. Ini dilakukan terutama untuk data seri waktu. Meskipun tidak bias, estimasi dapat menjadi tidak efektif jika ada autokorelasi. Uji LM Serial Correlation Breusch-Godfrey digunakan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa F-statistic= 2.8383, probabilitas (prob. F) sebesar 0,0835, dan Obs*R-squared = 5.5209, dengan probabilitas Chi-Square sebesar 0,063.

Kesimpulannya adalah tiada autokorelasi dalam model. Karena nilai probabilitas dari kedua uji itu lebih besar dari taraf alpha 0.05 atau 5%. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk menolak H_0 , yang menyampaikan sesungguhnya tidak ada autokorelasi antar residual. Durbin-Watson statistic senilai 2.0219 hampir dekat angka 2, yang juga mengindikasikan tidak adanya autokorelasi, memperkuat hasil uji sebelumnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	1.210157	Prob. F(1,21)	0.2838
Obs*R-squared	1.253193	Prob. Chi-Square(1)	0.2629

Tujuan utama dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengevaluasi apakah varians dari residual teknik regresi adalah konstan. Varians yang tidak konsisten (heteroskedastisitas) dapat menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien dan menghasilkan kesimpulan yang keliru.

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini menggunakan ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Test untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai F-statistic = 1.2102 dengan Prob. F(1,21) = 0.2838 dan Obs*R-squared = 1.2532 dengan Prob. Chi-Square(1) = 0.2629.

Tidak ditemukan heteroskedastisitas karena nilai probabilitas kedua uji lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Maka teknik regresi ini telah mencukupi asumsi klasik mengenai homoskedastisitas, karena varians residual adalah konstan, yang memperkuat validitas dan keandalan estimasi koefisien regresi.

d. Multikolinearity

Variance Inflation Factors

Date: 05/28/25 Time: 16:59

Sample: 2001 2024

Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
			NA
C	188.9676	1703.066	6.982908
LOG(UMR)	1.972757	3493.173	6.982908
AK	1.07E-12	405.8337	

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi linear yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi, yang dapat memengaruhi keandalan hasil estimasi. Ketidakstabilan dalam estimasi parameter dapat menyebabkan hasil regresi tidak dapat diandalkan. Meningkatnya varians koefisien regresi karena korelasi dengan variabel independen lainnya ditunjukkan oleh Index Variasi Independen (VIF). Multikolinearitas tinggi ditunjukkan oleh nilai $VIF > 10$. Tiada indikasi multikolinearitas yang signifikan jika $VIF \leq 10$.

$\text{LOG(UMR)} = 6.982908$ dan $\text{AK} = 6.982908$, kedua variabel independen memiliki nilai VIF < 10, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas serius dalam model. Meskipun nilai VIF mendekati angka 7, namun masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima menurut pedoman umum dalam analisis regresi (Gujarati, 2012). Model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas, dan hasil estimasi koefisien regresi dapat dianggap stabil dan dapat diinterpretasikan secara statistik.

Uji Hipotesis

Dependent Variable: TPT				
Method: Least Squares				
Date: 05/28/25 Time: 16:24				
Sample: 2001 2024				
Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46.43681	13.74655	3.378070	0.0028
LOG(UMR)	-2.996110	1.404549	-2.133148	0.0449
AK	4.69E-07	1.03E-06	0.454812	0.6539
R-squared	0.596127	Mean dependent var	7.508333	
Adjusted R-squared	0.448139	S.D. dependent var	2.196691	
S.E. of regression	1.631863	Akaike info criterion	3.933790	
Sum squared resid	55.92249	Schwarz criterion	4.081047	
Log likelihood	-44.20548	Hannan-Quinn criter.	3.972857	
F-statistic	10.33859	Durbin-Watson stat	1.036788	
Prob(F-statistic)	0.000749			

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Uji F (simultan)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung sebesar 10,338 lebih besar daripada F tabel 3,47, serta nilai probabilitas 0,0028 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti upah minimum provinsi dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Oleh karena itu, hipotesis alternatif diterima dalam penelitian ini.

b. Uji t (parsial)

- 1) Diperoleh nilai t hitung $2,1131 > t$ tabel 1,7207 variabel upah minimum menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0449 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis alternatif diterima karena terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel.
- 2) Diperoleh nilai t hitung $0,4548 < t$ tabel 1,7207 variabel angkatan kerja tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas sebesar $0,6539 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel uji hipotesis diatas menampilkan nilai R-Squared sebesar 0, 596127, yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi/kabupaten dan angkatan kerja bertanggung jawab atas 71,78 persen dari kontribusi variabel jumlah tingkat pengangguran terbuka. Variabel yang tidak diteliti memberikan kontribusi sebesar 28,22 persen dari total kontribusi.

d. Pembahasan Model Analisis

Persamaan regresi yang diperoleh dari teknik penelitian ini adalah $L(TPT) = 46.4368 - 2.9961 \times L(UMP/K) + 0.000000469 \times L(AK) + e$. Berdasarkan koefisien di atas, dapat dijelaskan bahwa jika variabel bebas seperti upah minimum provinsi/kabupaten dan angkatan kerja dianggap tidak berubah atau

memiliki nilai nol (logaritma nol = nilai asli = 1), maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara adalah 46,44%.

Setiap kenaikan 1 persen pada upah minimum provinsi/kabupaten (L(UMP/K)), maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,9961 persen, dengan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa baik upah minimum di tingkat provinsi/kabupaten maupun jumlah angkatan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Data dan analisis statistik menggambarkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi menimbulkan peningkatan tingkat pengangguran, terutama ketika pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dan diiringi oleh peningkatan kesempatan kerja yang memadai. Ini sejalan dengan temuan bahwa pasokan tenaga kerja yang berlebih dan upah yang tidak seimbang dengan kemampuan pasar kerja menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Selain faktor ekonomi makro, faktor internal seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dan digitalisasi turut memperparah kondisi ini. Secara umum, tren pengangguran di Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika upah minimum dan pertumbuhan angkatan kerja, yang keduanya perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah minimum dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan ekonomi daerah. Penetapan upah harus bersifat kompetitif namun realistik, mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis. Untuk mengurangi ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan industri, diperlukan kebijakan yang meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional. Selain itu, penciptaan lapangan pekerjaan baru harus diutamakan agar mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat.

PENGARUH VARIABEL UPAH MINIMUM PROVINSI/KABUPATEN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan pasar tenaga kerja akan membantu menurunkan tingkat pengangguran dan mendukung stabilitas ekonomi di Sumatera Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Abdianti, D., & Novera, M. (2024). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat berbagai masalah mulai dari masalah ketenagakerjaan . Dimana keadaan ini dapat muncul.* 3(4).
- Abidin, Z., Adewiyeh, R., Studi, P., Pembangunan, E., & Madura, U. T. (2024). *Buletin Ekonomika Pembangunan Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara Tahun Buletin Ekonomika Pembangunan.* 5(1), 80–90.
- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Alius, M., Shofia, A., Triha, H., Satria, T. F., Harma, B., & Mulia, J. R. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja, Inflasi dan Suku Bunga terhadap Jumlah UMKM. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(3), 290–296. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.232>
- Anggi Erlangga, M. Reza Falevi, Priliyanti Putri, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 161–177. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.191>
- ANITA, W. (2022). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja. *Pendapatan Pajak Daerah, Dan Ekspor Terhadap ...*, 02, 31–38.
- Badria, F. A. (2021). *Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2011-2020*.
- Fatoni, M. R., & Prasetyanto, P. K. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2021. *Jurnal Economina*, 1(3), 647–664.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 3 1,2,3. 10(September), 499–513.

- Khusnul, K. (2018). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, ANGKATAN KERJA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI DIY TAHUN 2009-2015 Khusnul Khotimah. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, Volume 7, 599–609. kkhotimah280@gmail.com
- Lumi, A. N. M., Walewangko, E. N., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(3), 162–172.
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 795–808. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94>
- Sofiah, S., Hendrawan, L., & Fauzi, A. R. F. (2024). Pengaruh Upah Minimum & Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2023. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 52–58. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.513>
- Suparta. (2023). Dampak Upah Minimum dan Pertumbuhan Sektoral terhadap Inflasi. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, Vol.12 No., 292–299.